



**KLIPING DIGITAL
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN**

03 - 04 Juli 2022



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04 / 07 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

| NO | ANALISIS | | TONE |
|----|--|---|------|
| 1 | TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME | Minggu, 03 Juli 2022 https://finance.detik.com/properti/d-6159864/bebas-syarat-karyawan-tetap-pegawai-honoror-juga-bisa-ajukan-kpr Bebas Syarat Karyawan Tetap, Pegawai Honoror Juga Bisa Ajukan KPR Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi Bank DKI memiliki program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini akan dipasarkan kepada karyawan kontrak atau Pegawai Tidak Tetap (PTT/PJLP/Honor/Kontrak) dan Linkage di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Itu artinya pegawai Pemprov DKI Jakarta yang tidak tetap seperti honorer ataupun kontrak tetap bisa mengajukan KPR. | + |
| 2. | TANGGAL MEDIA JUDUL NARASUMBER RESUME | Minggu, 03 Juli 2022 https://poskota.co.id/2022/07/03/jalan-alternatif-lingkar-timur-kuningan-selesai-dibangun-kemen-pupr-kurangin-kemacetan-ruas-cirebon-kuningan?view=all Jalan Alternatif Lingkar Timur Kuningan Selesai Dibangun, Kemen-PUPR: Kurangin Kemacetan Ruas Cirebon - Kuningan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan sepanjang 7,24 kilometer (km) di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Jalan Lingkar Timur Kuningan dibangun sejak tahun 2020 sebagai jalur alternatif dari Cirebon menuju Kuningan atau sebaliknya agar tidak perlu masuk dalam pusat kota di Kabupaten Kuningan. Pembangunan jalan lingkar timur ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan, di mana sebelumnya Pemda telah membangun sepanjang 6,5 km dari total sekitar 13,7 km. | + |



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

04 / 07 / 2022

Analisis Pemberitaan Media Online

| | | | |
|---|-------------------|---|---|
| 3 | TANGGAL | Minggu, 03 Juli 2022 | + |
| | MEDIA | https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/dprkpp-pembangunan-rusunami-di-surabaya-hanya-untuk-warga-lepas-status-mbr/ | |
| | JUDUL | DPRKPP: Pembangunan Rusunami di Surabaya Hanya untuk Warga Lepas Status MBR | |
| | NARASUMBER | Irvan Wahyudrajad Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Surabaya | |
| | RESUME | Pembangunan sembilan rumah susun sederhana milik di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang dimulai pada 2023 dikhususkan untuk warga yang sudah lepas dari status masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut dikonfirmasi Irvan Wahyudrajad Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Surabaya. Rusunami (rumah susun sederhana milik) disiapkan sebagai opsi bagi warga yang sudah lepas dari status MBR dan sebelumnya tinggal di rusunawa (rumah susun sederhana sewa. Kepala DPRKPP mengatakan, pihaknya saat ini sedang mematangkan rencana pembangunan rusunami yang rencananya, akan menggunakan skema anggaran Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta. | |



03 / 07 / 2022

Sumber: detik.com

Bebas Syarat Karyawan Tetap, Pegawai Honorer Juga Bisa Ajukan KPR

Author: Danang Sugianto

Jakarta - Status karyawan tetap merupakan salah satu syarat untuk mengajukan KPR ke bank. Tapi ternyata syarat itu tidak berlaku di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Bank DKI memiliki program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini akan dipasarkan kepada karyawan kontrak atau Pegawai Tidak Tetap (PTT/PJLP/Honor/Kontrak) dan Linkage di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Itu artinya pegawai Pemprov DKI Jakarta yang tidak tetap seperti honorer ataupun kontrak tetap bisa mengajukan KPR. Program ini juga merupakan realisasi dari Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Bank DKI dengan BP Tapera Januari 2022 kemarin.

Program ini juga merupakan salah satu dari acara gebyar promo yang dilakukan Bank DKI berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI, Babay Parid Wazdi menyampaikan acara yang digelar sejak 22 Juni 2022 tersebut digelar di lingkungan wilayah kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti Balaikota DKI Jakarta, Kantor Walikota

hingga Kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

"Program Gebyar Promo ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (3/7/2022).

Selain KPR, Bank DKI juga mendorong produk Kredit Multi Guna dan KPR Griya Monas. Salah satu caranya dengan memperluas pasar kredit konsumen tidak hanya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saja namun juga akan menyasar pasar konsumen yang telah ditargetkan dalam Business Mapping Bank DKI.

Di tahun 2021, penyaluran Kredit Multi Guna mengalami pertumbuhan sebesar 15,34% atau sebesar Rp 11,2 triliun di akhir 2020 menjadi Rp 12,9 triliun di akhir tahun 2021. Perkembangan Kredit Multi Guna selama tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain relatif meredanya pandemi Covid-19 dan peningkatan aktivitas pemasaran dan promosi produk.

<https://finance.detik.com/properti/d-6159864/bebas-syarat-karyawan-tetap-pegawai-honorer-juga-bisa-ajukan-kpr>



03 / 07 / 2022

Sumber: poskota.co.id

Jalan Alternatif Lingkar Timur Kuningan Selesai Dibangun, Kemen-PUPR: Kurangin Kemacetan Ruas Cirebon - Kuningan

Editor: Mayzka Da Reisa

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan sepanjang 7,24 kilometer (km) di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.

Jalan Lingkar Timur Kuningan dibangun sejak tahun 2020 sebagai jalur alternatif dari Cirebon menuju Kuningan atau sebaliknya agar tidak perlu masuk dalam pusat kota di Kabupaten Kuningan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, peningkatan aksesibilitas serta konektivitas jaringan infrastruktur jalan untuk memberikan kelancaran, keselamatan, keamanan, juga kenyamanan perjalanan pengendara.

"Akses jalan yang semakin baik juga akan menunjang perekonomian masyarakat sekitar," kata Menteri Basuki.

Pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan dimulai dari Desa Garatengah, Kecamatan Japara hingga Desa Kedungarum, Kecamatan Kuningan untuk mengurangi beban lalu lintas ruas Cirebon-Kuningan.

Sehingga lalu lintas bisa lebih lancar, sekaligus dapat menekan angka kecelakaan.

Pembangunan jalan lingkar timur ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kuningan, di mana sebelumnya Pemda telah membangun sepanjang 6,5 km dari total sekitar 13,7 km.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-Jawa Barat Kementerian PUPR Wilan Oktavian mengatakan, pembangunan Jalan Lingkar Timur Kuningan menggunakan anggaran APBN senilai Rp97,3 miliar.

Dari total panjang 7,24 km yang dibangun Kementerian PUPR, terdapat pembangunan jembatan sepanjang 50 meter.

"Kehadiran Jalan Lingkar Timur Kuningan ini efeknya untuk mengurangi kemacetan karena di Kuningan ruas Jalan Nasional melewati pusat kota," ujar Wilan.

"Manfaat lainnya juga dapat membuka akses lain bagi masyarakat sehingga meningkatkan dari sisi perekonomian," sambungnya.

Secara keseluruhan pekerjaan Jalan Lingkar Timur Kuningan berjalan sesuai rencana selesai Desember 2021.



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

03 / 07 / 2022

| Sumber: poskota.co.id

Lingkup pekerjaannya meliputi pembangunan ruas jalan sesuai standar nasional lebar badan jalan 7,5 meter dan bahu jalan 2 meter serta pembangunan jembatan sepanjang 50 meter.

<https://poskota.co.id/2022/07/03/jalan-alternatif-lingkar-timur-kuningan-selesai-dibangun-kemen-pupr-kurangin-kemacetan-ruas-cirebon-kuningan?view=all>



03 / 07 / 2022

Sumber: suarasurabaya.net

DPRKPP: Pembangunan Rusunami di Surabaya Hanya untuk Warga Lepas Status MBR

Author: Billy Patoppoi

Pembangunan sembilan rumah susun sederhana milik di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang dimulai pada 2023 dikhususkan untuk warga yang sudah lepas dari status masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut dikonfirmasi Irvan Wahyudrajad Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Surabaya.

“Rusunami (rumah susun sederhana milik) disiapkan sebagai opsi bagi warga yang sudah lepas dari status MBR dan sebelumnya tinggal di rusunawa (rumah susun sederhana sewa),” kata Irvan Wahyudrajad di Surabaya, Minggu (3/7/2022) dilansir *Antara*.

Menurut Irvan, warga yang sudah lepas dari MBR itu diharapkan bisa memiliki rumah seperti rusunami dengan angsuran rendah. Sehingga, rusunawa hanya sebagai transit untuk bisa memiliki rumah.

Kepala DPRKPP mengatakan, pihaknya saat ini sedang mematangkan rencana pembangunan rusunami yang rencananya, akan menggunakan skema anggaran Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.

Pemkot Surabaya, lanjut dia, telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait rencana pembangunan rusunami tersebut. Bahkan sebelumnya, pihak Kementerian PUPR sudah melakukan peninjauan.

“Kami arahnya ke depan, saran Pak Eri Cahyadi Wali Kota adalah rusunami bekerja sama dengan pengembang maupun perbankan untuk kredit murah dengan jangka waktu yang lama, mereka (warga) bisa memiliki rusun,” kata Irvan.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya itu memastikan, pemkot akan menyiapkan skema pembayaran rusunami dengan jangka panjang dan angsuran murah. Hal ini diharapkan supaya warga Surabaya bisa memiliki rumah layak huni sesuai dengan kemampuan mereka.

“Jadi misal SKBG (Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung) sampai 60 tahun, warga nyicilnya mungkin 30 tahun. Mungkin kalau Rp500 ribu per bulan itu mampu mereka,” kata Irvan.

Irvan juga menyebutkan, pemkot menyiapkan sembilan titik lokasi pembangunan rusunami dengan total 31 blok. Pembangunan rusunami yang dimulai pada 2023 tersebut bakal memanfaatkan lahan aset milik Pemkot Surabaya. Adapun lokasinya di antaranya berada di Tambak Wedi, Menanggal, Kedung Cowek, Bulak Banteng, Gunung Anyar, dan Medokan Ayu.

Selain itu, Irvan juga menjelaskan, jika pemkot terus berupaya mengentaskan warga yang tinggal di rusunawa agar segera terlepas dari status MBR, salah satunya yakni melalui pemanfaatan lahan aset milik



KLIPING BERITA DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

03 / 07 / 2022

| Sumber: suarasurabaya.net

pemkot untuk digunakan program padat karya.

“Semua warga yang tinggal di rusunawa kami data, apa yang diinginkan. Jadi warga yang tidak punya kerja, apakah itu orang tua atau anaknya, perintah Pak Wali Kota

adalah mendata semua dan memasukkan ke aplikasi padat karya,” pungkasnya.

<https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/dprkpp-pembangunan-rusunami-di-surabaya-hanya-untuk-warga-lepas-status-mbr/>